

Collaborative Governance dalam Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Sinjai

Asran¹, Umar Congge², Jamaluddin³

^{1,2,3}Universitas Muhammadiyah Sinjai

Email Korespondensi: asranrivaid@gmail.com

Abstrak: Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui *Collaborative Governance* Dalam Penanggulangan Kemiskinan Di Kabupaten Sinjai Tipe penelitian ini adalah kualitatif. Teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informan yang digunakan yaitu Dinas Sosial, Badan Pusat Statistik, Camat, dan masyarakat. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis intraktif dengan pengumpulan data reduksi data dan penyajian data serta memberi kesimpulan. Hasil penelitian ini memberikan kesimpulan bahwa *Collaborative Governance* Dalam Penanggulangan Kemiskinan Di Kabupaten Sinjai belum maksimal. Hal ini disebabkan karena beberapa alur koordinasi antar actor tidak terlalu bagus hal ini menjadi titik temu pada saat melakukan wawancara dari berbagai Informan. Koordinasi ini yang masih kurang sehingga dalam proses pengambilan keputusan dalam penanggulangan kemiskinan di kabupaten Sinjai masih tidak terlalu memberikan dampak yang sangat signifikan dalam menurunkan angka kemiskinan di Kabupaten Sinjai. Dengan ini, pemerintah Kabupaten Sinjai dapat menciptakan strategi yang holistik dan berkelanjutan dalam menanggulangi kemiskinan, melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat, sektor swasta, dan lembaga-lembaga lain yang terkait.

Kata kunci: *Collaborative Governance Dalam Penanggulangan Kemiskinan*

Abstract: The purpose of this research is to find out *Collaborative Governance in Poverty Reduction in Sinjai Regency* This type of research is qualitative. Data collection techniques are observation, interviews, and documentation. The informants used were the Social Service, the Central Bureau of Statistics, the sub-district head, and the community. The data analysis technique used is an interactive analysis technique with data collection data reduction and presentation of data and drawing conclusions. The results of this study provide a conclusion that *Collaborative Governance in Poverty Alleviation in Sinjai Regency* has not been maximized. This is because some coordination flows between actors are not very good, this is a meeting point when conducting interviews with various informants. This coordination is still lacking so that the decision-making process in poverty alleviation in Sinjai Regency still does not have a very significant impact on reducing poverty rates in Sinjai Regency. With this, the Sinjai Regency government can create a holistic and sustainable strategy in overcoming poverty, involving active participation from the community, private sector, and other related institutions.

Keywords: *Collaborative Governance in Poverty Reduction*

Article History :

Received 19-01-2025; Revised 14-02-2025; Accepted 08-03-2025

PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan masalah yang kompleks dan multidimensional yang mempengaruhi kehidupan jutaan orang di seluruh dunia. Di Indonesia, meskipun telah dilakukan berbagai upaya untuk mengurangi kemiskinan, namun angka kemiskinan masih cukup tinggi. Oleh karena itu, diperlukan upaya kolaborasi antara pemerintah dan berbagai pihak terkait untuk mengentaskan kemiskinan.

Kolaborasi pemerintah dalam pengentasan kemiskinan dapat dilakukan melalui berbagai program dan kebijakan yang melibatkan berbagai sektor, seperti sektor pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Program-program tersebut dapat berupa pemberian bantuan sosial, pelatihan keterampilan, pembangunan infrastruktur, dan lain sebagainya.

Oleh karena itu, penelitian tentang kolaborasi pemerintah dalam pengentasan kemiskinan sangat penting dilakukan untuk mengevaluasi efektivitas program-program yang telah dilakukan dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan program-program tersebut. Dengan demikian, diharapkan dapat tercipta upaya kolaborasi yang lebih efektif dalam mengentaskan kemiskinan di Indonesia.

Kolaborasi pemerintah dalam pengentasan kemiskinan dapat didefinisikan sebagai upaya kerjasama antara pemerintah dan berbagai pihak terkait, seperti sektor swasta, organisasi masyarakat sipil, dan masyarakat umum, untuk mengurangi kemiskinan. Kolaborasi ini dapat dilakukan melalui berbagai program dan kebijakan yang melibatkan berbagai sektor, seperti sektor pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Tujuan dari kolaborasi ini adalah untuk menciptakan kerangka kebijakan yang mempromosikan kesetaraan, inklusivitas, dan pembangunan berkelanjutan, serta meningkatkan akses dan kualitas layanan dasar seperti pendidikan, perawatan kesehatan, air bersih, sanitasi, dan perumahan. Kolaborasi pemerintah dalam pengentasan kemiskinan juga dapat mendorong investasi dan inovasi finansial untuk pengentasan kemiskinan, serta berkontribusi pada keberlanjutan jangka panjang dalam mengatasi kemiskinan.

Definisi kolaborasi pemerintah dalam pengentasan kemiskinan dapat didefinisikan sebagai suatu proses yang melibatkan pemerintah, sektor swasta, dan organisasi masyarakat sipil untuk menciptakan kerangka kebijakan yang mendukung pengentasan kemiskinan secara inklusif dan berkelanjutan. Fokus utama dalam kolaborasi ini adalah peningkatan akses dan kualitas layanan dasar seperti pendidikan, perawatan kesehatan, air bersih, sanitasi, serta pemberdayaan masyarakat yang miskin.

Proses kolaborasi ini melibatkan: 1. Peningkatan akses dan kualitas layanan dasar. 2. Pemberdayaan masyarakat miskin. 3. Kebijakan dan regulasi. 4. Legitimisasi dan dukungan masyarakat. 5. Investasi dan inovasi finansial. 6. Keberlanjutan jangka panjang dalam mengatasi kemiskinan. Kolaborasi ini juga membantu memperoleh dukungan dan legitimasi yang lebih luas dari masyarakat, serta memfasilitasi pengambilan keputusan dan pelaksanaan program yang lebih inclusive dan efektif.

Upaya kolaborasi pemerintah yang efektif dalam pengentasan kemiskinan meliputi: 1. Koordinasi antar sektor: Pemerintah perlu memastikan adanya koordinasi yang baik antara berbagai sektor terkait, seperti pendidikan, kesehatan, sosial, dan ekonomi, untuk menyusun program-program yang holistik dan terintegrasi. 2. Partisipasi masyarakat: Melibatkan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program-program pengentasan kemiskinan dapat meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan upaya tersebut. 3. Pengembangan kemitraan: Pemerintah dapat bekerja sama dengan sektor swasta, organisasi masyarakat sipil, lembaga internasional, dan lainnya untuk mengoptimalkan sumber daya dan pengetahuan dalam mengentaskan kemiskinan. 4. Penguatan kapasitas: Memberdayakan masyarakat melalui pelatihan keterampilan, pendidikan, dan akses informasi dapat membantu mengurangi ketimpangan sosial dan ekonomi.

Berdasarkan hasil pencarian, beberapa indikator yang digunakan untuk mengukur efektivitas kolaborasi pemerintah dalam pengentasan kemiskinan di Indonesia meliputi: 1. Indikator Kesehatan: Pemenuhan nutrisi, kematian anak, dan akses kesehatan. 2. Indikator Pendidikan: Lama sekolah, tingkat kehadiran sekolah, dan akses pendidikan. 3. Indikator Standar Hidup: Penggunaan bahan bakar memasak, sanitasi, air minum, listrik, rumah, dan aset. 4. Partisipasi Masyarakat: Tingkat partisipasi masyarakat dalam program-program pengentasan

kemiskinan. 5. Efisiensi dan Efektivitas Program: Analisis cost-benefit program pengentasan kemiskinan. 6. Dampak Sosial: Peningkatan kesejahteraan masyarakat, penurunan tingkat kemiskinan, dan peningkatan akses layanan kesehatan dan pendidikan. 7. Pemberdayaan Ekonomi Lokal: Peningkatan ekonomi lokal melalui program pemberdayaan ekonomi. 8. Inovasi Teknologi: Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan efektivitas program pengentasan kemiskinan.

Dalam program pengetasan Kemiskinan di Kabupaten Sinjai berbagai instansi yang memiliki peranan dalam menurunkan angka kemiskinan di kabupaten sinjai. Peran dari berbagai elemen tentunya sangat di harapkan untuk mampu mengambil peran dalam penetasan persoalan kemiskinan dan sebagaimana kita pahami secara Bersama dalam peraturan perundang undanga yang mengatur tentang Kemiskinan yang diatur di dalam PERMENSOS NO 3 Tahun 2021.

Di Kabuapten Sinjai Sendiri banyak Istansi yang menangani bagaimana proses pengentasan kemiskinan itu di lakukan Dinas Sosial misalnya disana ada Program Keluarga Harapan (PKH), ada Program Beras Untuk Keluarga Miskin (RASKIN), Kemudian ada di Dinas Pendidikan ada Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk meringankan masyarakat terkait adanya aturan wajib belajar 9 Tahun, kemudian ada Bantuan Siswa Miskin (BSM) bagi masyarakat miskin. Kemudian di Dinas lain itu berada di Dinas Kesehatan seperti Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS) dan masih banyak Dinas lain yang menangani beberapa hal terkait pengentasan kemiskinan yang ada di Kabupaten sinjai. Seperti halnya yang di kemukakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Sinjai di beberapa waktu yang lalu melalui media bahwa angka kemiskinan di Kabupaten Sinjai mengalami penurunan dari setiap Tahunnya salasatu yang disampaikan bahwa angka kemiskinan pada tahun 2022 sebanyak 8,80 persen sedangkan pada tahun 2023 sebanyak 8,55 persen.

Sedangkan data awal yang kami dapatkan terkait data kemiskinan yang ada di Kabupaten Sinjai pada kantor dinas Sosial Kabupaten Sinjai mulai pada tahun 2022 sebnayak 136,477 jiwa sedangkan pada tahun 2023 sekitar 133902 jiwa sedangkan Rekap DTKS Januari 2024 sebanyak 131 775 jiwa di Kabupaten Sinjai.

Dengan melihat berbagai perkembangan data awal sebagai calon peneliti tentang bagaimana penanggulangan kemiskinan yang ada di kabupaten sinjai ini tentunya bukan hanya menjadi pekerjaan bagi salah satu instansi atau Dinas di Kabupaten Sinjai tapi harus membutuhkan kerja Kolaborasi dalam penanggulangan Kemiskinan sehingga dalam setiap peran di di lingkup Dinas tersebut dapat bekerja sesuai regulasi yang ada tak terlepas dari itu peran Pemerintah Desa juga sangat penting untuk mengambil bagian tentang bagaimana kesejahteraan masyarakatnya dapat terpenuhi secara massif. Selain kalangan pemerintahan tentunya peran serta Lembaga Kemasyarakatan lainnya tentunya harus megambil peran aktif seperti organisasi Karang taruna yang ada di desa ataupun Lembaga-lembaga organisasi yang ada.

METODE PENELITIAN

Penelitian dengan judul “Collaborative Governance Dalam Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Sinjai ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian eksplanasi. Creswell menyatakan penelitian dengan pendekatan kualitatif merupakan serangkaian metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau sekelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemasyarakatan (Creswell, 2019). Penelitian berupaya mengkaji secara mendalam, tetapi dalam konteks alamiah dan menyeluruh terhadap fenomena atau obyek yang diteliti Adapun yang menjadi fokus penelitian meliputi: kondisi awal (*starting condition*), desain kelembagaan (*institutional design*), kepemimpinan fasilitatif (*facilitative leadership*), dan dimensi inovasi dalam dalam implementasi pengentasan kemiskinan di Kabupaten Sinjai, Adapun Informan yang dianggap representatif adalah Ketua TIM Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Sinjai, Dinas Sosial Kabupaten Sinjai, Statistik Kabupaten Sinjai, Camat Sinjai Borong dan Camat Sinjai Utara dan Masyarakat penerima bantuan. Sedangkan dalam prose pengumpulan data peneliti lakukan seperti Pengamatan (*Observation*), Wawancara Mendalam (*In-depth interview*), Dokumentasi (*Documentation*) dan Teknik Analisis Data selanjutnya peneliti melakukan Pemeriksaan validitas data reliabilitas data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan empat teknik yaitu Kredibilitas (*credibility*), Transferability (*transferability*), *Dependability* (*dependability*).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemerintahan dan Lembaga Lokal atau Aktor yang terlibat dalam penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Sinjai.

Pemerintah Kabupaten Sinjai memainkan peran penting dalam penanggulangan kemiskinan melalui kebijakan dan program-program sosial yang diterapkan oleh instansi pemerintah, seperti Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, dan Bappeda. Kolaborasi antara pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) juga cukup aktif, terutama dalam pengimplementasian program-program pemberdayaan ekonomi dan pemberian bantuan sosial.

Selain pemerintah, sektor swasta dan LSM juga memainkan peran penting dalam pemberdayaan masyarakat miskin. Beberapa LSM lokal berfokus pada isu pemberdayaan perempuan, pendidikan anak-anak dari keluarga miskin, dan peningkatan keterampilan kerja bagi masyarakat miskin.

Hal ini selaku peneliti menemukan beberapa hal sebagai actor yang terlibat dalam proses penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Sinjai.

Tabel 4.2, Aktor dalam Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Sinjai

NO	Aktor	Kolaborasi	ket
1	Dinas Sosial	PJS Kesehatan	
2	Dinas Kesehatan	Bantuan GIZI	
3	BAZNAS	Bantuan Rumah Layak Huni	
4	Swasta	Penyaluran BLT Sembako	
5	Pemerintah Desa	Beras Raskin	
6	Perbankan	Penyaluran BLT	
7	Disperindag	Pasar Murah	
8	POS	Penyaluran BLT	
9	Koprasi	Simpan Pinjam	
10	Dinas Pertanian	Bantuan Bibit, BLT Buru tani tembakau	
11	Dinas PMD	BLT Dana Desa	

Di Kabupaten Sinjai sendiri Peran dan Partisipasi Para Aktor dalam mengambil bagian dalam penanggulangan Kemiskinan cukup signifikan meskipun banyak kendala yang di dapatkan sebagaimana peran serta misalnya:

- a. Pemerintah Kabupaten Sinjai berperan sebagai fasilitator utama yang mengkoordinasikan program penanggulangan kemiskinan melalui instansi-instansi terkait, seperti Dinas Sosial dan Badan Pusat Statistik Kabupaten Sinjai. Pemerintah juga menyediakan anggaran dan kebijakan untuk mendukung kolaborasi ini.
- b. Sektor Swasta berperan melalui program CSR (Corporate Social Responsibility) yang mendukung kegiatan pengentasan kemiskinan, misalnya dengan memberikan bantuan modal usaha atau pelatihan keterampilan teknis.
- c. Masyarakat dilibatkan secara aktif dalam merencanakan dan menjalankan beberapa program. Partisipasi mereka cenderung meningkat dalam bentuk pengawasan dan keterlibatan langsung dalam program-program pemberdayaan lokal.

Dari berbagai data yang peneliti dapatkan beberapa program penanggulangan kemiskinan yang telah di lakukan oleh pemerintah pusat melalui pemerintah daerah seperti halnya:

- a. Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk masyarakat miskin.
- b. Program Keluarga Harapan (PKH) yang memberikan bantuan tunai kepada keluarga yang memenuhi kriteria tertentu.
- c. Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) yang bertujuan untuk meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat desa.
- d. Program Peningkatan Keterampilan Usaha (PKU) yang menawarkan pelatihan keterampilan untuk meningkatkan kesempatan kerja dan pendapatan masyarakat. Namun, efektivitas program-program ini sering tergantung pada bagaimana aktor-aktor yang terlibat, seperti pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat, berkolaborasi.

Dari beberapa gambarang diatas peneliti melihat koordinasi dari berbagai actor masih seringkali menjadi hambatan dalam proses pengimplementasian program seperti:

- a. Koordinasi Antar Aktor: Meskipun kolaborasi sudah berjalan, masih terdapat beberapa kendala dalam hal koordinasi. Misalnya, perbedaan tujuan antara pemerintah dan sektor swasta kadang menyebabkan keterlambatan dalam pelaksanaan program.
- b. Keterbatasan Sumber Daya: Kendala finansial dan keterbatasan tenaga ahli menjadi salah satu penghalang utama dalam mengoptimalkan kolaborasi. Terutama bagi sektor yang sering kali bergantung pada dana hibah yang tidak stabil.
- c. Partisipasi Masyarakat: Walaupun masyarakat sudah dilibatkan, masih ada kesenjangan partisipasi, terutama dari kelompok marginal yang terkadang sulit terakses oleh program-program bantuan.

Pemerintah daerah telah berupaya untuk memperbaiki mekanisme koordinasi dengan berbagai Sektor, namun masih dibutuhkan perbaikan dalam hal komunikasi dan pengelolaan sumber daya.

Jika kita melihat posisi Kabupaten sinjai dari 24 kabupaten yang ada di Sulawesi selatan yang boleh dikatakan daera yang sangat produktifitas karena memiliki wilyah pegunungan dan kelautan yang sangat memadai untuk memberikan dampak kesejahteraan bagi masyarakat jika hal tersebut di kelolah dan dimanfaatkan sebaik mungkin.

Jika kita melihat data atau angka kemiskinan yang ada di kabupaten Sinjai dengan melihat berbagai program yang telah dilakukan penurunan angka kemiskinan masih relative rendah seharusnya Angka kemiskinan kita semakin sedikit dengan adanya program-program pemerintah yang dianggap mampu menjawab setiap kebutuhan mendasar bagi masyarakat.

Tabel 3.1 Garis Kemiskinan, Jumlah, dan Persentase Penduduk Miskin Di Kabupaten Sinjai Mulai Tahun 2021-2023

Tahun	Garis Kemiskinan (Rupiah, Kapita/Bulan)	Jumlah Penduduk Miskin	Persentase Penduduk Miskin
2021	352.490	21,69	8,84
2022	374.226	21,67	8,80
2023	397.562	21,14	8,55

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei sosial ekonomi nasional

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat kita simpulkan bahwa dalam program penanggulangan kemiskinan di kabupaten sinjai perlu ada langkah program yang sistematis dan terukur secara sistematis yang harus dilakukan oleh dinas social khususnya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Jika melihat dari keempat poin tersebut diatas yang di kemukakan oleh dinas social terkait penanggulangan Kemiskinan yang ada di Kabupaten Sinjai bahwa program penanggulangan kemiskinan telah dilakukan berbagai upaya demi menekan angka kemiskinan yang semakin hari belum menemukan terkait Langkah yang paling tepat yang harus di ambil oleh pemerintah.

Mengingat kemiskinan bersifat dinamis, maka updating data kemiskinan perlu dilakukan secara periodik guna menghindari atau mereduksi adanya inclusion error ataupun exclusion error dalam penyaluran bantuan sosial. Untuk itu, dibutuhkan komitmen tinggi seluruh stakeholders dan masyarakat untuk melakukan pemutakhiran (updating) terhadap Basis Data Terpadu Kemiskinan sebagai data induk seluruh program penanganan kemiskinan sesuai amanat UU No. 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin. Termasuk memastikan mekanisme Musdes atau Muskel yang selama ini dilakukan berjalan sebagaimana mestinya sebagai upaya meningkatkan kualitas pengelolaan data kemiskinan secara lebih transparan, akuntabel, dan partisipatif. Kami percaya bahwa pembangunan kesejahteraan Sosial akan optimal manakala partisipasi public dibuka secara luas.

Jika kita melihat secara seksama terkait data kemiskinan di kabupaten Sinjai tentunya dari setiap Dinas atau organisasi Perangkat daerah OPD yang menangani berbeda beda di karenakan tolak ukur dalam penentuan kemiskinan itu berbeda beda sehingga sangat sulit dalam proses penanggulangan secara matam akan tetapi dilakukan dengan masing-masing tupoksi yang diberikan oleh pemerintah Pusat.

Jika kita melihat dari pola yang dilakukan oleh Dinas Sosial dalam proses penanggulangan kemiskinan yang ada di kabupaten Sinjai tentunya menjadi Langkah yang tepat dalam proses verifikasi langsung Bersama pemerintah desa yang lebih memahami kondisi masyarakatnya sehingga segala kemungkinan hal human eror itu bisa teratasi dengan baik.

Dalam penanggulangan kemiskinan tentunya adanya berbagai program yang telah dilaksanakan sebagaimana hasil diatas akan tetapi dalam prosesnya banyak hal yang menjadi kendala dan dampak kolaborasi yang pada akhirnya mampu memberikan sejauh mana program atau realisasi daripada program pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan di Kabupaten sinjai seperti halnya:

- a. Penurunan Angka Kemiskinan: Berkat adanya kolaborasi multi-aktor, beberapa program pemberdayaan ekonomi berhasil mengurangi angka kemiskinan di sejumlah desa di Kabupaten Sinjai, meski skalanya masih terbatas.
- b. Pemberdayaan Masyarakat: Kolaborasi ini berdampak pada peningkatan kapasitas masyarakat melalui pelatihan-pelatihan yang disediakan oleh pemerintah. Banyak warga yang sebelumnya tidak memiliki keterampilan, kini mampu menjalankan usaha kecil-kecilan yang membantu peningkatan pendapatan mereka.
- c. Akses Bantuan Sosial: Program-program bantuan sosial seperti bantuan tunai, bantuan pangan, dan program rumah layak huni menjadi lebih tepat sasaran dengan adanya koordinasi yang baik antar aktor.
- d. Kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat berjalan melalui forum-forum diskusi dan musyawarah perencanaan pembangunan daerah (Musrenbang). Di forum ini, aktor-aktor yang terlibat dapat menyampaikan ide, permasalahan, dan solusi yang relevan dengan pengentasan kemiskinan.
- e. Pengambilan keputusan bersifat kolektif, dengan pemerintah memegang kendali utama, namun tetap terbuka terhadap masukan dari berbagai pihak. Sektor lain seringkali berfungsi sebagai perantara antara masyarakat dan pemerintah dalam menyampaikan aspirasi warga miskin.

Dari hasil pengamatan dan wawancara selaku peneliti banyak hal yang ditemukan dalam program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Sinjai, salah satu hal itu adalah terbentuknya Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Sinjai dimana Tim ini dianggap mampu garda terdepan dalam penanggulangan kemiskinan akan tetapi keberadaan Tim ini tidak terlalu berfungsi sebagaimana mestinya karena program koordinasi tidak pernah dilaksanakan semenjak Tim ini terbentuk.

Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara di pemerintah kecamatan Sinjai Borong terkait bagaimana kolaborasi dari berbagai dinas yang menangani persoalan penanggulangan kemiskinan di kabupaten Sinjai, hal ini berbagai dinamika dalam proses setiap kebijakan yang lahir bagi dari segi kebijakan, implementasi kebijakan serta evaluasi kebijakannya.

Berdasarkan hasil dari seluruh proses penelitian baik itu berupa wawancara langsung, observasi, dokumentasi serta pengamatan yang saya lakukan selaku peneliti banyak hal yang mampu kami dapatkan yang masih kurang maksimal dalam proses Kolaborasi penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Sinjai sesuai, hal ini disebabkan oleh berbagai hal baik dari segi kewenangan, sumber daya manusia, keuangan serta program yang betul-betul mampu menuntaskan masalah kemiskinan yang ada di Kabupaten Sinjai ini.

Dari berbagai data yang peneliti dapatkan tentunya ini menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah dimasa yang akan datang untuk lebih meningkatkan Kolaborasinya seperti koordinasi yang senantiasa terbagun dari segala stek holder dan pelibatan langsung bagi seluruh actor untuk meminimalisir human eror dalam berbagai program penanggulangan kemiskinan di kabupaten sinjai.

KESIMPULAN

- A. Penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan collaborative governance di Kabupaten Sinjai dalam penanggulangan kemiskinan memiliki potensi yang baik, namun masih perlu diperkuat dalam hal koordinasi, alokasi sumber daya, dan keterlibatan masyarakat. Kolaborasi yang lebih erat dan terstruktur antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat diharapkan dapat memberikan dampak yang lebih signifikan dalam upaya pengentasan kemiskinan di masa depan.
- B. Implikasi dan Rekomendasi

Rekomendasi untuk Meningkatkan *Collaborative Governance*

1. Meningkatkan Koordinasi: Dibutuhkan penguatan mekanisme koordinasi antar aktor, misalnya melalui pembentukan tim gabungan atau sekretariat khusus untuk mengelola komunikasi dan pengawasan program penanggulangan kemiskinan.
2. Peningkatan Kapasitas Aktor Lokal: Pemerintah perlu mengadakan pelatihan tambahan bagi aparatur desa dan masyarakat agar mereka lebih memahami mekanisme collaborative governance dan bisa lebih aktif dalam kolaborasi.
3. Penyediaan Dana Berkelanjutan: Pemerintah dan sektor swasta bisa bekerja sama lebih erat untuk menciptakan model pembiayaan berkelanjutan yang bisa mendukung program-program penanggulangan kemiskinan dalam jangka panjang.
4. Pembentukan tim pendamping di berbagai desa hal ini bisa menjadi power bagi pemerintah untuk penanggulangan kemiskinan dan bisa jadi akan mempercepat laju prekonomian bagi warga miskin, sebagai Langkah proses pendampingan ini jika hal tersebut bisa di selenggarakan maka banyak hal yang bisa di lakukan oleh pendamping yang terjun langsung di tengah tengah masyarakat dimulai dari pola hidup, pemanfaatan lingkungan rumah yang bisa jadi menghasilkan sesuatu baik itu yang bisa di manfaatkan sendiri maupun untuk orang lain.

REFERENSI

- ADHIVA, R. Z. (n.d.). *Kolaborasi dan Komunikasi Perangkat Daerah dalam Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Banyumas*.
- Afrida, M. (n.d.). Penanggulangan Kemiskinan Di Provinsi Aceh Dalam Pendekatan Collaborative Governance Oleh Tim Koordinasi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik 7.4* (2022).
- ALFINO, D. Y. (n.d.). *Inovasi Pelayanan Melalui Aplikasi Kasir (E-Barcode) Dalam Bantuan Pangan Non Tunai*.
- Amaliah, Y. (2021). *Collaborative Governance Dalam Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Barru (Collaborative Governance in Poverty Reduction in Barru District)*.
- Anggrain, Nadiya Wanti, and D. M. (n.d.). Collaborative Governance Dinas Sosial Provinsi Riau dalam Menangani Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial. *Of Social and Policy Issues* (2022): 34-38.
- Garg, Bharati, and R. B. (n.d.). "Collaborative governance for urban sustainability: *Asia Pacific Journal of Public Administration* 43.4 (2021): 236-257.
- Hernawati, S. (2018). Peran Perempuan dalam Mengentaskan Kemiskinan melalui Upaya Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). *Jurnal Progress*, 1(1).
- Irawan, I. (n.d.). "Advocacy Strategies of Civil Society Organisations in Decentralised Indonesia: an Exploration Using a Policy Window Framework. *Khazanah Sosial* 5.3 (2023): 534-550.
- Kadji, Y. (n.d.). *Kemiskinan dan Konsep teoritisnya*.

- Kharisma, B. (n.d.). Good Governance Sebagai Suatu Konsep Dan Mengapa Penting Dalam Sektor Publik Dan Swasta. *Jurnal Buletin Studi Ekonomi* 19.1 (2014): 1-34.
- La Ode Syaiful Islamy, H. (n.d.). Collaborative governance konsep dan aplikasi. *Deepublish*, 2018.
- Lay, C. (n.d.). Democratic transition in local Indonesia: An overview of ten years democracy. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik* 15.3 (2012): 207-219.
- Mandasari, N. (2023). Perbandingan Konsep Tata Kelola Pemerintah: Sound Governance, Dynamic Governance, dan Open Government. *Ebisma (Economics, Business, Management, & Accounting Journal)*, 3(1), 46–62. <https://doi.org/10.61083/ebisma.v3i1.26>
- Mardimin, J. (n.d.). *Dimensi kritis proses pembangunan di Indonesia*.
- Nisa, Fadila, Aisyah Ameilia, and R. A. (n.d.). Analysis of poverty in eastern Indonesia (Analisis Kemiskinan Di Kawasan Timur Indonesia). *Outline Journal of Economic Studies* 2.2.
- Nurkse, R. (n.d.). The problem of currency convertibility today. *Proceedings of the Academy of Political Science*.
- Pandangai, Andi, and E. H. A. (n.d.). Program Badan Usaha Lorong Inovasi Dalam Rangka Pengentasan Kemiskinan. *Jurnal Sosial Dan Administrasi Publik* 1.1 (2023): 26-31.
- Pasquero, J. (1991). (n.d.). Supraorganizational collaboration. *The Journal of Applied Behavioral Science*, 27(1), 38-64.
- Pattinama, M. J. (n.d.). Pengentasan kemiskinan dengan kearifan lokal. *Jurnal Makara Sosial Humaniora* 13.1 (2009).
- Prima, S. M. (n.d.). Analisis Pemerintahan Dalam Pelayanan Publik. *Diss. Faculty of Social and Political Science*, 2017.
- Putri, Evalia Nuranita, and H. N. (n.d.). *Collaborative Governance Dalam Penanggulangan Stunting*. *Faculty of Social and Political Science*, 2021.
- Rajab, B. (n.d.). Memaknai Kemiskinan: Peran Kelembagaan Dalam Menanggulangi Lingkaran Setan Kemiskinan. *Jurnal Masyarakat Dan Budaya* 8.2 (2006).
- Raymond, R. (n.d.). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemiskinan Di Propinsi Kepulauan Riau. *Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial* 2.3 (2017).
- Saksono, H. (n.d.). Ekonomi kreatif: Talenta baru pemicu daya saing daerah. *Journal of Home Affairs Governance* 4.2 (2012): 93-104.
- Solikatun, Supono, Yulia Masrurroh, and A. Z. (n.d.). Kemiskinan dalam pembangunan. *Jurnal Analisa Sosiologi*.
- Wahyunengseh, Rutiana Dwi, Sri Hastjarjo, and D. G. S. (n.d.). Diseminasi komponen collaborative governance untuk penyusunan peraturan walikota tentang penanggulangan kemiskinan. *Jurnal Aplikasi Ipteks Untuk Masyarakat* 9.2 (2020): 78-84.

Yudaningsih, N. (n.d.). *Inovasi Dalam Pembangunan.*".

Yunifar, Allya Tsamarah, Bambang Kusbandrijo, and A. P. (n.d.). Collaborative Governance Pada Penerapan Perwali No 79 Tahun 2022 Tentang Percepatan Penurunan. *Penelitian Administrasi Publik* (e-ISSN: 2797-0469) 2.04 (2022): 148-158.

Yunita, Primadiana, Ibnu Asqori Pohan, and W. R. S. (n.d.). Kinerja Kelembagaan, Relasi Struktural, dan Koalisi Advokasi Pemerintah Daerah: Studi kasus Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Malang. *Jurnal Ekonomi Dan Ilmu Sosial* 8, No. 2 (2023).

Yusuf, Rima Ranintya, and A. A. N. (n.d.). Inovasi sebagai Strategi Reformasi Administrasi Pemerintah Daerah. *Jurnal Good Governance* (2023): 197-210.

Zahara, Asni, et al. (n.d.). Sistem Demokrasi Dalam Pemilihan Umum Di Indonesia.". *Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Kependidikan* 2.1 (2023): 1-22.

Yusoff, M, Rahman, S.,A., Mutalib, S., and Mohammed, A., 2006, Diagnosing Application Development for Marketing Using Neural Network Technique, *Journal of Information Technology*, vol 18, hal 152-159.